# BAB II

# KAJIAN TEORITIK

## A. Kajian Pustaka

### 1. Pengertian Komunikasi Politik

Komunikasi politik merupakan dua istilah yang sebenarnya masing-masing telah memiliki konsentrasi ilmu tersendiri. Istilah komunikasi sudah sedemikian populer dan dipergunakan oleh kebanyakan orang. Pengertian dasarnya pun telah bergeser dan berkembang sehingga istilah tersebut umum digabungkan dengan objek dan istilah lainnya. Istilah komunikasi berasal dari kata *communicatio* atau dari kata *communis* yang dalam bahasa indonesia berarti 'sama maknanya' atau 'pengertian bersama', dengan maksud untuk mengubah pikiran, sikap, perilaku, penerima dan melaksanakan apa yang diinginkan oleh komunikator. Para ahli juga telah memberikan batasan-batasan pengertian komunikasi, antara lain:[19]

a. James A.F. Stoner, dalam bukunya yang berjudul: Manajemen, menyebutkan bahwa komunikasi adalh proses dimana seseorang berusaha memberikan pengertian dengan cara pemindahan pesan.

b. John R. Schemerhorn, dalam bukunya yang berjudul *Managing Organizational Behavior,* menyatakan bahwa komunikasi itu dapat diartikan sebagai proses antar pribadi dalam mengirim dan menerima simbol-simbol yang berarti bagi kepentingan mereka.

[19] A. W. Widjaja, *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat* (Jakarta: Bumi aksara, 1993), hlm.8.



digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. William F. Glueck, dalam bukunya *Manajement*, menyatakan bahwa komunikasi dapat dibagi dalam dua bagian utama, yakni:

1) *Interpersonal Communications*, komunikasi antar pribadi yaitu proses pertukaran informasi serta pemindahan pengertian antara dua orang atau lebih di dalam suatu kelompok kecil manusia.

2) *Organizational Communications*, yaitu dimana pembicara secara sistematis memberikan informasi dan memindahkan pengertian kepada orang banyak di dalam organisasi dan kepada pribadi-pribadi dan lembaga-lembaga diluar yang ada hubungan.

Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki pengertian penyampaian informasi atau pesan dari seseotang kepada orang lain. Komunikasi akan dapat berhasil apabila timbul saling pengertian atau pemahaman terhadap pesan atau informasi yang disampaikan. Hal ini pulalah yang terjadi kiranya terhadap komunikasi dalam politik, khususnya komunikasi dalam institusi politik dimana seorang pemimpin politik harus mampu memberikan informasi atau pesan yang bisa diterima dengan baik oleh para anggotanya.

Selain itu, umumnya dalam komunikasi organisasi, tak luput juga institusi politik, hambatan-hambatan dalam proses komunikasi dapat timbul dalam berbagai macam bentuk. Namun pada umumnya dapat digolongkan dalam tiga hambatan utama, yaitu[20]:

[20] *Ibid.*, hlm.16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Hambatan semantik (bahasa): hambatan semantik dalam komunikasi dapat menjadi suatu hambatan yang utama dalam proses penyampaian pesan secara efektif karena pesan akan disalah-artikan sehingga tidak akan mencapai apa yang diinginkan. Bahasa sebagai lambang komunikasi yang disampaikan komunikator seringkali tidak dipahami oleh komunikan sehingga terjadi kesalahan penafsiran atau arti.

b. Hambatan teknis: hambatan ini terjadi karena terdapat keterbatasan fasilitas dan peralatan komunikasi. Sehingga pesan yang disampaikan menjadi tidak utuh. Kebisingan juga dapat memicu dalam hambatan ini.

c. Hambatan bola salju : hambatan ini berasal dari manusianya sendiri, dalam komunikasi sebuah organisasi atau birokrasi yang mempunyai banyak anggota akan mengakibatkan adanya perbedaan persepsi dan menyimpang, pesan yang diterima menjadi membesar sampai jauh karena pesan yang disampaikan akan ditanggapi sesuai dengan selera para penerima pesan. Sebagai contoh, dalam penelitian ini seperti komunikasi birokrat desa kepada warga desa. Pesan dapat berubah sedemikian rupa sehingga inti dari pesan yang ingin disampaikan tidak terwujudkan.

Selain istilah komunikasi, istilah politik tak kalah populernya dalam masyarakat. Umumnya segala sesuatu yang dilakukan atas dasar kepentingan kelompok atau kepentingan kekuasaan seringkali disematkan dengan istilah politik. Mengenai istilah politik, Jean Bodin lah ilmuan pertama yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan istilah ilmu politik. Akan tetapi, istilah politik yang dimaksud pada saat itu adalah ilmu negara sebagaimana tertulis dalam karya-karya sarjana Eropa yang bersifat institusional yuridis.[21]

Harolld D. Laswell lebih tegas merumuskan politik sebagai sebagai ilmu tentang kekuasaan. Dalam pengertian lain, politik diartikan bermacam kegiatan dalam suatu sistem politik (atau negara) yang menyangkut proses menentukan tujuan tersebut. Dalam pengertiannya, politik diartikan berbeda-beda sebab pemikir terkadang hanya melihat politik dari aspek tertentu. Tetapi pokok dari politik itu adalah negara, kekuasaan, pengambilan keputusan, kebijakan, dan distribusi atau alokasi.[22]

Dalam dimensi politik, salah satu unsurnya adalah politik sebagai studi kekuasaan. Dengan kata lain, politik digunakan untuk mengatur masyarakat agar mereka bisa taat dan tunduk pada aturan. Hal itu juga menandakan bahwa penguasa memiliki wewenang yang lebih tinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat dibandingkan dengan masyrakat sendiri.

Dimensi politik selain sebagai studi kekuasaan, juga sebagai studi kelembagaan. Kelembagaan yang dimaksud unit kerja dimana lapangan yang diatur sedemikian rupa. Dalam lembaga, terdapat wilayah, penduduk, dan pemerintahan. Dalam hal ini, lembaga bertugas untuk menjaga dan melindungi penduduk maupun wilayah.[23]

---

[21] Hafied Cangara, *Komunikasi Politik, Konsep, Teori dan Strategi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 26.
[22] Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media, 2010), hlm. 23.
[23] *Ibid.*, hlm. 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oleh sebab itu, sebuah pemerintahan memiliki sifat memaksa dan monopoli terhadap penduduk dengan otoritas atau kewenangan yang pemerintah miliki tersebut. Kewenangan tersebut sebenarnya bersifat baik dalam artian pemerintah harus mengatur dan menjaga penduduk agar nyaman dan aman. Akan tetapi, terkadang kewenangan itu diselewengkan dengan menerapkan kebijakan yang merugikan penduduk maupun penyelewengan-penyelewengan lainnya.

Secara sederhana, politik merupakan upaya atau cara untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki. Makanya, tiimbul pengartian lain bahwa politik tak hanya dapat dilakukan oleh pemangku jabatan atau pemerintah negara. Dalam beberapa aspek kehidupan, manusia sering melakukan tindakan politik, baik politik dagang, budaya, sosial dan lain sebagainya.

Maka dari pembahasan diatas, secara sederhana komunikasi politik adalah suatu proses dan kegiatan-kegiatan yang membentuk sikap dan perilaku politik yang terintegrasi ke dalam suatu sistem politik. Rusdi Kantaprawira memberikan pengertian komunikasi politik yaitu untuk menghubungkan pikiran politik yang hidup dalam masyarakat, baik pikiran dalam satu golongan, instansi, asosiasi, atau dalam perpolitikan pemerintah.[24]

Komunikasi politik juga bisa disimpulkan sebagai komunikasi yang melibatkan didalamnya pesan - pesan politik dan aktor - aktor politik atau komunikasi yang berkaitan dengan kekuasaan, jalannya pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Proses komunikasi politik dimaknai sebagai proses penyampaian pesan.

---

[24] Rochmat Harun dan Sumarno, *Komunikasi Politik Suatu Pengantar* (Bandung: Bandar Maju, 2006), hlm. 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komunikasi politik menurut Nimmo sebagai kegiatan orang secara kolektif yang mengatur perbuatan mereka di dalam konflik sosial. Lebih lanjut, berbagai perbedaan seperti jasmani, cita-cita, perilaku dan sebagainya dalam masyarakat, jika masyarakat tersebut menganggap serius maka akan dituntut perhatian mereka terkait masalah itu dan menyelesaikannya dengan bersama. Hal itu merupakan kegiatan politik.[25] Komunikasi yang terjadi antar kelompok maupun antara satu pihak dengan pihak lain dalam kepentingan salah satu kelompok atau kepentingan bersama menandakan bahwa hubungan tersebut merupakan jalinan komunikasi politik. Sebab, dalam pengertian sederhana politik berarti upaya mempengaruhi untuk memperoleh sesuatu yang dikehendaki.

Secara garis besar, komunikasi politik memiliki tiga bentuk, yaitu propaganda, iklan, dan hubungan masyarakat (*public relation*). Namun karena politik seringkali ditafsirkan sebagai kekuasaan, maka komunikasi politik juga dipandang sebagai *political mean* atau alat politik untuk mencapai kekuasaan.[26]

**2. Unsur-unsur Komunikasi Politik**

Seperti unsur-unsur komunikasi pada umumnya, komunikasi politik juga terdiri dari beberapa unsur yaitu: komunikator politik, komunikan, isi (pesan) komunikasi, media komunikasi, tujuan komunikasi, efek, dan sumber

[25] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek* (Bandung: PT. Emaja Rosdakarya, 2001), hlm. 108.
[26] Novel Ali, *Peradaban Komunikasi Politik* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), hlm. 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikasi.[27] Setiap unsur fungsinya jelas mengarah kepada tercapainya fungsi primer komunikasi politik yaitu tujuan komunikasi.

a. Komunikator politik

Komunikator politik berarti individu-individu yang berada dalam suatu institusi, asosiasi, partai politik, lembaga pengelola media massa serta tokoh masyarakat. Komunikator politik dapat pula berupa negara, badan-badan internasional dan mereka yang mendapat tugas atas nama negara.

Komunikator politik merupakan bagian integral dalam berlangsungnya proses komunikasi. Komunikator politik yang memberi warna dominan terhadap proses komunikasi yaitu komunikator yang menduduki stuktur kekuasaan, karena mereka yang mengelola dan mengendalikan transformasi pesan-pesan komunikasi dan mereka yang menentukan kebijakan suatu negara. Oleh sebab itu, komunikator politik harus memiliki beberapa syarat agat tercapai sasaran komunikasi sebagaimana yang diharapkan, diantaranya yaitu:

1) Memiliki nuansa yang luas tentang berbagai aspek dan masalah kenegaraan.
2) Memiliki komitmen moral terhadap sistem nilai yang sedang berlangsung.
3) Berorientasi kepada kepentingan negara.
4) Memiliki kedewasaan emosi

[27] Teuku May Rudy, *Komunikasi dan Humas Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 03.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) Jauh dari sikap hipokrit

Komunikator politik yang berada dalam struktur kekuasaan disebut juga sebagai elit berkuasa. Sedangkan elit yang tidak duduk pada struktur kekuasaan disebut elit masyarakat yaitu elit yang paling besar jumlahnya, karena elit ini berada dalam berbagai asosiasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan seluruh aspek kehidupan.

b. Komunikan

Komunikan adalah seseorang atau sekelompok orang sebagai subjek yang dituju oleh komunikator, yang menerima pesan-pesan berupa lambang-lambang yang mengandung arti atau makna.

c. Isi (pesan) komunikasi

Isi komunikasi merupakan produk penguasa setelah melalui proses encoding atau setelah diformulasikan ke dalam simbol-simbol sesuai lingkup kekuasaan. Pada dasarnya isi komunikasi terdiri dari:

1) Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transformasi pesan.
2) Panduan dan nilai idealis yang tertuju kepada upaya mempertahankan dan melestarikan sistem nilai yang sedang berlangsung.
3) Sejumlah metode dancara pendekatan untuk mewujudkan sifat-sifat integratif bagi penghuni sistem.
4) Karakteristik yang menunjukkan identitas negara.
5) Motivasi sebagai dorongan dasar yang memicu pada upaya meningkatkan kualitas bangsa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari ungkapan diatas memberi informasi bahwa komunikasi di dalam prosesnya berada pada struktur formal. Pesan-pesan mengalir menurut jenjang struktur kekuasaan sampai kepada sasaran.

d. Media komunikasi

Media komunikasi menjadi pusat perhatian penguasa sebagai alat untuk mendapat legitimasi rakyat di dalam melakukan kebijaksanaan dan sekaligus memperkuat kedudukan penguasa melalui pesan-pesan komunikasi yang telah direpresentasikan ke dalam simbol-simbol kekuasaan.

e. Tujuan komunikasi

Tujuan komunikasi dalam komunikasi politik selalu berhimpit, bahkan melembaga dengan tujuan negara untuk mencapai tujuan tersebut. Sifat dan bentuk tujuan yang hendak dicapai akan sangat bergantung kepada sistem politik yang mendasarinya. Hal ini akan tampak jelas darri ideal normatif negara yang tetuang dalam ketentuan normati masing-masing sistem.

f. Efek komunikasi

Efek adalah hasil dari penerimaan pesan atau informasi yang disampaikan kepada komunikan, pengaruh atau kesan yang timbul dari komunikan setelah menerima pesan tersebut. efek dapat berlanjut dengan pemberian respon atau tanggapan yang sering disebut umpan balik atau feedback. Feedback adalah arus balik yang beupa tanggapan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dari komunikan dalam rangka proses komunikasi yang bertujuan saling pengertian atau memperoleh pemahaman bersama.

g. Sumber komunikasi politik

Sumber sangat menentukan kualitas dan kredibilitas komunikasi. Sumber diartikan sebagai asal keluarnya, diperoleh atau munculnya isu, informasi yang dapat dijadikan materi pesan komunikasi. Sumber dapat berasal dari individu karena adanya ide yang sangat berharga atau dapat pula berasal dari kalangan elit politik serta dapat pula berasal dari suatu paham.[28]

Dari unsur-unsur tersebut, keberhasilan proses komunikasi pada akhirnya bermuara pada kemampuan komunikator dalam memotivasi komunikan untuk berbuat sesuatu sesuai kebijaksaannya yang telah ditetapkan komunikasi elit berkuasa.

### 3. Fungsi Komunikasi Politik

Fungsi komunikasi politik merupakan struktur politik yang menyerap berbagai aspirasi, pandangan, dan gagasan yang berkembang dalam masyarakat dan menyalurkannya sebagai bahan dalam penentuan kebijakan. Dengan demikian fungsi membawakan arus informasi balik dari masyarakat ke pemerintah dan dari pemerintah ke masyarakat.[29]

Terkait fungsi, ada yang terkait secara langsung dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan pemerintahan dan ada fungsi yang tidak terkait langsung

[28] *Ibid.*, hlm. 05.
[29] Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media, 2010), hlm. 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan pelaksanaan kebijakan pemerintahan. Fungsi yang tidak secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan adalah fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutment politik, dan fungsi komunikasi politik itu sendiri.

Fungsi yang secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijakan adalah:[30]

a. Fungsi artikulasi kepentingan

   Upaya mewujudkan pola hubungan baru yang menampung seluruh kepentingan melalui proses sintesis aspirasi banyak orang itulah yang dinamakan artikulasi kepentingan. Dengan demikian, artikulasi dapat juga dikatakan sebagai suatu proses yang mengolah aspirasi masyarakat yang bercorak ragam yang disaring dan dirumuskan dalam bentuk rumusan yang teratur. Berarti, aspirasi yang beraneka ragam itu dapat dipahami untuk selanjutnya dicerminkan dalam kebijakan.

b. Fungsi agregasi kepentingan

   Menggabungkan berbagai kepentingan yang sama atau hampir sama untuk disatukan dalam rumusan kebijaksanaan lebih lanjut inilah yang dinamakan agregasi kepentingan. Jadi dengan proses agregasi kepentingan yang muncul bukan lagi kepentingan suatu kelompok saja, akan tetapi masyarakat keseluruhan.

[30] Mochtar Mas'oed, Colin Mall Andrew, *Perbandingan Sistem Politik* (Jogjakarta: Gajah Mada University Press, 1990), hlm. 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Fungsi pembuatan kebijakan

Fungsi ini merupakan fungsi yang didapatkan badan perwakilan rakyat (legislatif) yang memiliki sejumlah hak, seperti hak prakarsa, yaitu hak untuk mengajukan usulan rancangan undang-undang; hak amandemen, yaitu hak untuk mengubah rancangan undang-undang; hak budget, yaitu hak untuk ikut menetapkan anggaran belanja negara. Di sampinh itu, badan perwakilan rakyat memiliki interplasi yaitu hak meminta keterangan kepada pemerintahan dan hak angket yaitu untuk melakukan penyelidikan serta hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah.

d. Fungsi penerapan kebijakan

Fungsi ini dimiliki oleh pemerintah atau eksekutif. Pemerintah tidak hanya berfungsi menerapkan kebijakan, tetapi juga harus menjelaskan dari setiap kebijakan agar tercipta pengertian dan warga dengan mudah melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Eksekutif juga berhak membuat berbagai macam aturan dengan acuan pokok aturan-aturan yang telah digariskan oleh lembaga legislatif.

e. Fungsi penghakiman kebijakan

Fungsi penghakiman ini merupakan fungsi untuk membuat keputusan yang mencerminkan rasa keadilan apabila terjadi pelanggaran terhadap peraturan perundangan. Sebab penghakiman peraturan bertujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjamin kepastian hukum tercapainya ketertiban dalam masyarakat.[31]

Dengan demikian fungsi komunikasi politik secara total yaitu mewujudkan kondisi negara yang stabil dengan terhindar dari faktor-faktor negatif yang mengganggu keutuhan negara.

**4. Tujuan Komunikasi Politik**

Tujuan komunikasi politik sangat terkait dengan pesan politik yang disampaikan komunikator politik. Sesuai dengan tujuan komunikasi, maka tujuan komunikasi politik itu adakalanya sekedar menyampaikan informasi politik, membentuk citra politik, membentuk opini publik, dan dapat pula menangani pendapat atau tuduhan lawan politik.[32]

a. Citra politik

Dalam Kamus Ilmiah Populer, citra diartikan sebagai gambar, rupa, atau bentuk.[33] Dalam bahasa inggris kata ini juga sering dipadankan dengan kata image. Dalam pengertian lain, citra merupakan serangkaian pengetahuan dan pengalaman serta perasaan maupun penilaian yang diorganisasikan ke dalam sistem kognisi manusia, pengetahuan pribadi yang diyakini kebenarannya.

Jadi citra politik dapat dipahami sebagai gambaran seseorang terkait dengan politik. Citra politik berkaitan dengan pembentukan pendapat

[31] *Ibid*., hlm. 31.
[32] Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media, 2010), hlm. 44.
[33] Pius Partanto, M. Dahlan Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Penerbit Arkola, 2001), hlm. 09.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

umum karena pada dasarnya pendapat umum politik terwujud sebagai konsekuensi dari kognisi komunikasi politik.

Dengan penjelasan tersebut, citra politik dapat dirumuskan sebagai gambaran tentang politik yang memiliki makna kendatipun tidak selamanya sesuai dengan realitas politik yang sebenarnya.

Nimmo menjelaskan citra seseorang yang terkait dengan politik yang terjalin melalui pikiran jernih dan hati yang murni akan memberi kepuasan baginya, dan memiliki setidaknya tiga kegunaan. Pertama, memberi pemahaman tentang peristiwa politik tertentu. Kedua, kesukaan dan tidaknya kepada citra seseorang tentang politik menyajikan dasar untuk menilai objek politik. Ketiga, citra diri seseorang memberikan cara menghubungkan dirinya pada orang lain.[34]

Citra politik seseorang akan membantu dalam pemahaman, penilaian, dan pengidentifikasian peristiwa, gagasan, tujuan, atau pemimpin politik.

Pembentukan citra politik sangat erat kaitannya dengan sosialisasi politik. Sosialisasi politik mencakup tiga hal:

1) Seluruh pengetahuan politik seseorang (kognisi), baik benar maupun keliru.
2) Semua referensi (afeksi) yang melekat pada tahap tertentu dari peristiwa politik yang menarik.

[34] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek* (Bandung: PT. Emaja Rosdakarya, 2001), hlm. 07.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Semua pengharapan (konasi) yang dimiliki orang tentang apa yang mungkin terjadi jika ia berperilaku dengan cara berganti-ganti terhadap objek dalam situasi itu.[35]

b. Opini publik

Selain citra politik, komunikasi politik juga bertujuan membentuk dan membina opini publik serta mendorong partisipasi politik. Konsep opini publik bertitik tolak dari asasi yang ada pada diri manusia, yaitu hak kebebasan mengeluarkan pendapat, menyatakan kehendak, ide, atau gagasan.

Pengertian dari opini publik belum mencapai kesepakatan sampai saat ini. Tetapi dari pengertian beberapa tokoh dapat menjelaskan makna dan pengertian opini publik (umum), diantaranya:

1) Pendapat umum adalah pendapat, sikap perasaan, pendirian, dan harapan rata individu kelompok dalam masyarakat tentang suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan umum atau persoalan sosial.
2) Pendapat umum yaitu hasil interaksi, diskusi, atau penilaian sosial antar individu tersebut yang berdasarkan pertukaran pikiran yang rasional dan dinyatakan dengan lisan maupun dengan tulisan.
3) Isu atau maslah yang didiskusikan itu adalah hasil dari apa yang dilontarkan oleh media massa.

[35] Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media, 2010), hlm. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Pendapat umum hanya dapat berkembang pada negara yang memakai sistemdemorasi. Negara membeerikan keleluasan kepada wganya untuk berpendapat di depan umum tentang masalah negara, sosial, atau lainnya.[36]

Pendapat umum yang sehat hanya dapat tumbuh di dalam masyarakat yang mempunyai kebebasan berpikir dan kebebasan mengeluarkan pendapat. Selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah cara mengendalikan pendapat umum. Di negara-negara demokrasi berbagai cara telah digunakan demi mengukur perkembangan dari opini publik, seperti dengan cara penjajakan, pengumpulan pendapat umum melalui tulisan maupun lisan.

c. Partisipasi politik

Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Partisipasi ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, dapat dilakukan dengan langsung atau tidak langsung. Secara langsung yaitu dilakukan dengan melalui kontak-kontak dengan para pejabat negara yang ikut menentukan dalam pembuatan kebijakan politik. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dapat melalui media massa dengan menuliskan pemikiran dan gagasannya terkait kebijakan atau perpolitikan.

[36] *Ibid.*, hlm. 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Partisipasi politik masyarakat secara lebih jelas dapat dikategorikan sebagai berikut:

1) Electoral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan pemilihan umum.
2) Lobbying, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang untuk menghubungi pejabat pemerintahan tertentu dengan tujuan mempengaruhi pejabat tersebut untuk mengerti dan terpengaruh dengan masalah tertentu terkait dengan kehidupan mereka.
3) Organizasional activity, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktifis, atau seorang warga biasa.
4) Contacting, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga negara dengan secara langsung pejabat pemerintah atau tokoh politik, baik dilakukan dengan sendirian maupun dengan sekelompok kecil orang.
5) Violence, cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah juga dapat dimasukkan dalam kategori partisipasi politik, hanya saja cara yang digunakan untuk mempengaruhi pemerintah dengan pengrusakan.

Partisipasi politik dilakukan oleh khalayak politik yang bukan politikus atau bukan pemimpin politik dan pengikutnya. Dengan kata lain,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

komunikator politik adalah politikus dan partisipan politik adalah khalayak politik.[37]

**5. Strategi Komunikasi Politik**

Strategi dalam komunikasi politik yaitu keseluruhan keputusan kondisional pada saat ini tentang tindakan yang akan digunakan untuk mencapai tujuan politik pada masa mendatang. Oleh sebab itu pemimpin politik selalu dibutuhkan dalam setiap aktifitas komunikasi politik.[38]

a. Keberadaan pemimpin politik

Dalam masyarakat terdapat stratifikasi kekuasaan yang dimiliki. Yang memiliki kekuasaan disebut elit (pemimpin), dan yang tidak memiliki kekuasaan, karena itu mematuhi aturan pemilik kekuasaan disebut massa rakyat.

Kepemimpinan menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi tidak sebaliknya. Jika kekuasaan sudah pasti terkait dengan kepemimpinan atau memiliki hak prerogatif dalam menentukan kebijakan sedangkan kepemimpinan lebih menekankan pada kemampuan persuasi untuk mempengaruhi pengikutnya.

Orang yang secara formal menjadi elit politik dapat saja memainkan peran sebagai pemimpin politik asalkan memiliki karakteristik kepemimpinan tersebut.

[37] Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khalayak dan Efek* (Bandung: PT. Emaja Rosdakarya, 2001), hlm. 126.
[38] Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media, 2010), hlm. 73.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Merawat ketokohan dan memantapkan kelembagaan

Ketokohan dan mantapnya suatu lembaga memberikan pengaruh khusus kepada masyakarat. Ketokohan adalah orang yang memiliki kredibilitas, daya tarik, dan kekuasaan. Ketokohan ditentukan dengan keahlian seseorang tersebut dan kepercayaan dari masyarakat.

Dalam komunikasi politik, terutama retorika atau pidato politik, khalayak pada hakikatnya tertarik kepada siapa (tokoh politik) daripada apa (pesan politik) yang akan disampaikan.

Selain dari keahlian diri, ketokohan juga terbangun dari *gesture* dan daya tarik fisik sekalipun seperti pakaian dan dukungan fisik lainnya.

Selain memelihara ketokohan, langkah strategis utama yang harus dilakukan adalah memantapkan dan membesarkan lembaga. Sebab ketokohan seseorang akan meningkat jika ia didukung oleh lembaga yang ternama. Lembaga yang dimaksud merupakan wadah kerja sama beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama.

Di sisi lain, publik sangat menghargai lembaga yang dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhannya. Dengan demikian upaya memperbesar lembaga harus diusahakan oleh para aktor politik.

c. Menciptakan kebersamaan

Langkah strrategis selanjutnya untuk mencapai tujuan komunikasi politik yaitu menciptakan kebersamaan antara aktor-aktor politik

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan masyarakat dengan cara mengenal khalayak dan menyusun pesan yang menarik simpati masyarakat.[39]

Bentuk dan isi pesan harus disusun sedemikian rupa oleh komunikator politik. Biasanya khalayak tertarik kepada politik yang sesuai dengan kebutuhan hidup, ideologi, dan agamanya. Selain itu, motovasi individu-individu harus dikenali dan dipahami serta mengetahui kemampuan khalayak dalam mengakses pesan-pesan politik, baik langsung maupun lewat media.

Setelah memahami khalayak barulah menyusun pesan-pesan politik. Syarat yang perlu diperhatikan dalam menyusun pesan politik yang bersifat persuasif yaitu menentukan tema dan materi yang sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak. Syarat utama pesan politik tersebut harus mampu membangkitkan perhatian masyarakat.

Langkah selanjutnya kemudian memilih metode penyampaian dan metode menyusun isi pesan politik yang sesuai. Pemilihan metode ini harus disiesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas, dan biaya. Terdapat beberapa metode yang biasa digunakan dalam komunikasi politik dengan khalayak, yaitu: a) redunancy, b) canalizing, c) informative, d) persuasive, e) educative, f) cursive.[40]

Selain itu, penggunaan medium (tunggal) atau media (jamak) juga perlu dipilah dan dipilih dengan cermat agar sesuai dengan kondisi dan situasi khalayak.

---

[39] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paadigma Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 155.
[40] Ardial, *Komunikasi Politik* (Jakarta: PT. Indeks Permata Puri Media, 2010), hlm. 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Negosiasi

Dalam komunikasi politik, negosiasi adalah bagian yang selalu muncul dalam aktifitas komunikasi politik. Dengan demikian negosiasi menjadi salah satu strategi dalam komunikasi politik. Sebab dalam negosiasi juga penuh dengan berbagai gaya dan seni sehingga negosiasi berjalan lancar.

Negosiasi sangat erat kaitannya dengan komunikasi persuasif atau membujuk. Negosiasi diperlukan ketika kepentingan seseorang atau kelompok tergantung pada perbuatan orang atau kelompok lain yang juga memiliki kepentingan lain. Kemudian keadaan tersebut yang harus dicapai dengan mengadakan negosiasi sehingga melahirkan kesepakatan yang menguntungkan bagi kedua pihak.

Dalam melakukan negosiasi juga perlu melakukan persiapan sebab dalam negosiasi akan selalu dijumpai tawar-menawar. Negosiator yang baik adalah yang memiliki kekuatan tawar menawar yang baik.

Secara umum negosiasi adalah pertemuan dua pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan atas pokok-pokok masalah yang:

1) Penting dalam pandangan kedua pihak
2) Dapat menimbulkan konflik diantara kedua pihak
3) Membutuhkan kerjasama kedua pihak untuk mencapainya

Saat negosiasi berlangsung di dalamnya terdapat dua faktor terpisah yang patut dipertimbangkan. Faktor pertama, dalam semua proses saat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negosiasi. Faktor kedua, yang menyertai proses yaitu sikap dan perilaku antar pribadi.

Terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait negosiasi, yaitu:

1) Kita harus dapat memetakan masalah dan harus tahu dengan jelas setiap permasalahan yang telah ada dan memperkirakan permasalahan yang akan terjadi selanjutnya.
2) Kita harus tahu siapa saja sasaran setiap permasalahan dan apa yang dibutuhkan.
3) Kita harus tahu siapa saja pihak yang bisa dirangkul atau pihak yang harus dilokalisir bila timbul permasalahan
4) Kita harus tahu teknik persuasif yang biasa dilakukan dengan mengkombinasikan berbagai elemen dalam komunikasi.[41]

e. Membangun konsensus

Langkah strategis berikutnya yang perlu dilakukan dengan membangun konsensus dengan para aktor politik satu lembaga atau partai maupun dengan para aktor politik partai lain.

Suasana dialogis seperti ini harus dibangun melalui penciptaan kebersamaan. Hal ini dilakukan agar semua pihak memiliki kedekatan emosi dan timbul rasa empati dari masing-masing aktor politik.

Konsensus dicapai setelah ada konflik atau perbedaan pendapat terhadap suatu masalah.[42] Hal ini kerap terjadi biasanya dalam rapat,

[41] *Ibid.*, hlm. 107.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan, atau musyawarah dalam menentukan program, kebijakan, dan keputusan tertentu.

Dalam kasus lain, terkadang konflik politik diselesaikan melalui kegiatan komunikasi politik yang dikenal sebagai lobi, yaitu para politikus yang memiliki kepentingan berbeda secara infomal. Baik dari tingkat negara hingga tingkat desa terkadang para tokoh, penguasa, maupun individu biasa melakukan lobi satu sama lain demi kepentingan politik maupun kepentingan murni masyarakat.

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Pertukaran Sosial

Dalam teori pertukaran sosial, interaksi manusia layaknya sebuah transaksi ekonomi. Masing-masing dari individu mencoba untuk memaksimalkan manfaat dan memperkecil biaya.[43] Satu ciri khas teori pertukaran yang menonjol merupakan *cost* (biaya atau pengorbanan) dan *reward* (penghargaan atau manfaat) yang diperoleh dari interaksi tersebut. Jika *cost* yang dikorbankan oleh seseorang tidak sesuai dengan *reward* yang diterimanya maka seseorang itu tidak akan senang dan akibatnya interaksi tersebut akan mengalami gangguan sehingga (mungkin) menghentikan interaksinya.

Meskipun teori pertukaran sosial memiliki banyak tokoh, tetapi secara umum khususnya dalam sosiologi salah satu tokoh yang terkenal yaitu George C.

---

[42] Anwar Arifin, *Komunikasi Politik: Paadigma Teori-Aplikasi-Strategi dan Komunikasi Politik di Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), hlm. 183.
[43] Littlejohn, Stephen W., Karen A. Foss., *Teori Komunikasi* (Jakarta: Salemba Humanika, 2011), hlm. 292.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Homans. Dalam pemikiran Homans, semakin tinggi ganjaran (*reward*) yang diperoleh atau yang akan diperoleh, maka semakin besar pula kemungkinan suatu tingkah laku tersebut akan diulang. Begitu juga sebaliknya, semakin tinggi biaya (*cost*) atau ancaman hukuman (*punishment*) yang akan diperoleh semakin kecil kemungkinan tingkah laku serupa akan diulang.

Selain berdasar teori transaksi ekonomi, teori pertukaran sosial Homans juga berakar dari teori perilaku (*behavior*) Skinner dalam psikologi.[44] Sehingga teoi ini amat cocok digunakan untuk menganalisis fakta komunikasi atau interaksi sosial pada skala mikro seperti penelitian ini yang subjek kunci dan interkasinya yaitu Kepala Desa dengan *Bajing*.

Homans percaya bahwa proses pertukaran dapat dijelaskan lewat pertanyaan proposisional yang saling berhubungan dan berasal dari psikologi Skinnerian.[45] Proposisi tersebut yaitu:

a. Proposisi sukses

   "Dalam setiap tindakan, semakin sering suatu tindakan tertentu memperoleh ganjaran, maka kian kerap ia akan melakukan tindakan itu."

Homans menyatakan bahwa bilamana seseoang berhasil memperoleh ganjaran ataupun menghindari hukuman maka ia akan cenderung untuk mengulangi tindakan tersebut. Secara umum, perilaku yang selaras dengan proposisi sukses meliputi tiga tahap antara lain: tindakan seseorang, hasil yang

[44] Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 61.
[45] *Ibid.*, hlm. 61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan, dan pengulangan tindakan atau minimal dalam beberapa hal tindakan tersebut menyerupai tindakan yang telah dilakukan tersebut.

b. Proposisi stimulus

> "Bila dalam kejadian di masa lalu dorongan tertentu atau sekumpulan dorongan telah menyebabkan tindakan orang diberi hadiah, maka makin serupa dorongan kini dengan dorongan masa lalu, makin besar pula kemungkinan orang melakukan tindakan serupa."

Proposisi stimulus mengetengahkan objek atau tindakan yang memperoleh ganjaran yang diinginkan. Homans tertarik pada proses generalisasi dalam arti kecenderungan memperluas perilaku keadaan yang serupa. Dalam contoh memancing atau mengail, satu aspek generalisasi dapat mendorong dari mengail di kolam yang keruh ke mengail di kolam manapun dengan derajat kerindangan tertentu. Begitu pula, keberhasilan menangkap ikan mungkin mendorong orang dari satu cara mengail ke cara mengail yang lain. Sebagai contoh dari mengail di sungai ke mengail di laut atau dari mendorong orang dari mengail ke berburu.

c. Proposisi nilai

> "Makin tinggi nilai hasil tindakan seseorang bagi dirinya, maka kian besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu."

Proposisi ini khusus berhubungan dengan ganjaran atau hukuman yang merupakan hasil tindakan. Proposisi nilai mengetengahkan tingkat dimana orang menginginkan ganjaran yang diberikan oleh stimulus. Disini Homans

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memperkenalkan konsep hadiah dan hukuman. Hadiah merupakan tindakan dengan nilai positif; makin tinggi nilai hadiah, makin besar mendatangkan perilaku yang diinginkan. Hukuman merupakan tindakan dengan nilai negatif; makin tinggi hukuman berarti makin kecil kemungkinan mendatangkan perilaku yang diinginkan. Homans juga menemukan bahwa hukuman merupakan alat yang tak efisien untuk membujuk orang mengubah perilaku mereka karena orang dapat bereaksi terhadap hukuman menurut cara yang tak diinginkan. Sebenarnya lebih baik tak memberikan hadiah (serta tak memberi hukuman) terhadap perilaku yang tak diinginkan. Perilaku demikian akhirnya akan dihentikan.

d. Proposisi deprivasi-kejemuan

> "Semakin sering di masa yang baru berlalu seseorang menerima suatu ganjaran tertentu, maka semakin kurang bernilai bagi orang tersebut peningkatan setiap unit ganjaran itu."

Dalam hal ini, Homans mendefinisikan dua konsep penting lainnya yaitu biaya dan keuntungan. Biaya tiap perilaku didefinisikan sebagai hadiah yang hilang karena tak jadi melakukan sederetan tindakan yang direncanakan. Keuntungan dalam pertukaran sosial dilihat sebagai sejumlah hadiah yang lebih besar yang diperoleh atas biaya yang dikeluarkan.

Yang terakhir ini menyebabkan Homans menyusun kembali proposisi kerugian-kejemuan sebagai berikut: makin besar keuntungan yang diterima seseorang sebagai hasil tindakannya, makin besar kemungkinan ia melakukan tindakan itu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Proposisi persetujuan-agresi

"Bila tindakan seseorang tidak memperoleh ganjaran yang diharapkannya atau menerima hukuman yang tidak diinginkan, maka dia akan marah, dia menjadi sangat cenderung menunjukkan perilaku agresif, dan hasil perilaku demikian menjadi lebih bernilai baginya. Bilamana tindakan seseorang memperoleh ganjaran yang diharapkannya, khusus ganjaran yang lebih besar dari yang diperkirakan atau tidak memperoleh hukuman yang diharapkannya, maka dia akan merasa senang, dia akan lebih mungkin melaksanakan perilaku yang disenanginya, dan hasil dari perilaku yang demikian akan menjadi lebih bernilai harganya."

Proposisi ini merupakan proposisi konflik Homans. Jika sesuatu tidak sesuai dengan apa yang diharapkan maka akan marah bahkan akan melakukan perlawanan. Konsep frustasi dan marah dalam pemikiran Homans ini tidak hanya mengacu kepada keadaan internal (mental) tetapi dapat pula mengacu pada seluruh kejadian eksternal.

f. Proposisi rasionalitas

"Dalam memilih di antara berbagai tindakan alternatif, seseorang akan memilih satu di antaranya yang dianggap saat itu memiliki nilai, sebagai value (V), dikalikan dengan probabilitas (P) untuk mendapatkan hasil yang lebih besar."[46]

[46] George Ritzer, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern* (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012, ed. 08), 723.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya, orang menelaah dan melakukan kalkulasi atas berbagai tindakan alternatif yang tersedia baginya. Mereka membandingkan jumlah imbalan yang diasosiasikan dengan setiap tindakan. Mereka pun mengkalkulasikan kecenderungan bahwa mereka benar-benar akan menerima imbalan. Imbalan yang bernilai tinggi akan hilang nilainya jika seseorang menganggap bahwa itu semua dipandang sangat mungkin diperoleh. Jadi terjadi interaksi antara nilai imbalan dengan kecenderungan diperolehnya imbalan. Imbalan yang paling tidak diinginkan adalah imbalan yang paling tidak bernilai dan cenderung tidak mungkin atau sulit diperoleh.

Proposisi rasionalitas menunjukkan pengaruh teori pilihan rasional pendekatan Homans. Homans mengaitkan proposisi rasionalitas dengan keberhasilan, stimulus, dan propisisi nilai. Proposisi rasionalitas mengatakan pada kita bahwa benar tidaknya orang akan melakukan tindakan tergantung pada persepsi mereka tentang probabilitas sukses. Homans berargumen bahwa persepsi apakah peluang sukses tinggi atau rendah ditentukan oleh sukses di masa lalu dan kemiripan dengan situsi masa kini dengan situasi sukses di masa lalu.

Pada akhirnya teori Homans dapat diringkas menjadi pandangan tentang aktor sebagai pencari keuntungan yang rasional. Namun, teori Homans yang berangkat dari pendekatan psikologi mengandung kelemahan di segi keadaan mental dan di segi struktur berskala luas. Tetapi meski dengan kelemahan demikian Homans tetap menjadi pakar perilaku (behaviorist) yang berpikir dengan tegas di tingkat perilaku individual.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia menyatakan bahwa struktur berskala luas hanya dapat dipahai jika kita memahami perilaku sosial mendasar secara memadai. Ia berpendapat bahwa proses pertukaran adalah identik di tingkat individual dan kemasyarakatan, meski ia juga mengakui bahwa di tingkat kemasyarakatan cara penyatuan proses mendasar itu jauh lebih kompleks.[47]

[47] George Ritzer, Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2003, ed. 06), hlm. 367.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id